

COVER

BUKU PANDUAN PELAPORAN TATA KELOLA LOGISTIK PEMILU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya Tim Penulis dapat menyelesaikan penyusunan **Buku Pedoman Tata Kelola Tempat Penyimpanan/Gudang dan Pendistribusian Logistik Pemilu ke Tempat Pemungutan Suara** ini. Penyusunan pedoman ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dan pergerakan logistik pemilu dilaksanakan secara terstandarisasi, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, logistik Pemilu merupakan salah satu unsur paling strategis yang menentukan keberhasilan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Logistik Pemilu bukan sekadar komponen pendukung, melainkan bagian integral yang menentukan terpenuhinya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, tata kelola penyimpanan serta pendistribusiannya harus diselenggarakan secara cermat, terukur, dan terdokumentasi.

Kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam, meliputi wilayah perkotaan hingga kepulauan terpencil, menuntut adanya standar operasional dan mekanisme distribusi yang mampu menjamin ketepatan waktu, akurasi jumlah, serta integritas setiap paket logistik Pemilu hingga tiba di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tantangan distribusi dalam penyelenggaraan Pemilu yang kerap muncul adalah keterlambatan distribusi, kendala moda pengangkutan, kondisi cuaca, hingga kendala akses wilayah. Situasi tersebut menegaskan pentingnya pedoman yang komprehensif dan dapat dilaksanakan pada seluruh tingkatan satuan kerja.

Buku pedoman ini disusun untuk memberikan acuan teknis yang jelas mengenai tata kelola penyimpanan, pengamanan, pengendalian kualitas, serta mekanisme pendistribusian Logistik Pemilu dari tingkat Penyedia hingga TPS, termasuk prosedur pasca pemungutan suara. Pedoman ini mengintegrasikan prinsip manajemen rantai pasok yang modern, ketertelusuran (*traceability*), mitigasi risiko, serta kesiapsiagaan terhadap kondisi darurat, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan distribusi logistik Pemilu yang efisien, transparan, dan berintegritas.

Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, pemikiran, dan tenaga dalam penyusunan pedoman ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi rujukan utama bagi seluruh Tenaga KPU, Pengangkut, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Semoga pedoman ini dapat memperkuat kualitas tata kelola logistik serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang semakin baik di masa mendatang.

Jakarta, November 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

LAMPIRAN

GLOSARIUM

1. **Pemilu** adalah Pemilihan Umum.
2. **Dapil** atau Daerah Pemilihan, meliputi Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
3. **DPT** adalah Daftar Pemilih Tetap, dan **DPTb** adalah Daftar Pemilih Tambahan.
4. **KPU** adalah Komisi Pemilihan Umum yang berlokasi di pusat, dan di bawahnya terdapat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
5. **PPK** adalah Panitia Pemilihan Kecamatan.
6. **PPS** adalah Panitia Pemungutan Suara.
7. **BTTB** adalah Bukti Tanda Terima Barang.
8. **Silog** adalah Sistem Informasi Logistik.
9. **Logistik Pemilu** adalah Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, seperti tertuang pada Keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024 - Tata Kelola Logistik Pemilu dan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2024 - Logistik Pemilu.
10. **Perlengkapan Pemungutan Suara** terdiri atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan TPS.
11. **Dukungan Perlengkapan Lainnya** terdiri atas sampul kertas, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal Tenaga ketertiban TPS, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, bolpoin, gembok, spidol, formulir berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tunanetra.
12. **Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya** terdiri atas salinan DPT, salinan DPTb, daftar Pasangan Calon, label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi.
13. **Logistik Pasca Pemungutan Suara** adalah Logistik Pemilu yang telah selesai digunakan pada pemungutan suara dan penghitungan suara. Logistik ini diantaranya berupa kotak suara yang berisi surat suara dan formulir.
14. **Tempat Penyimpanan/Gudang** adalah bangunan tempat penyimpanan Logistik Pemilu berupa gudang, gedung, rumah toko (ruko), lapangan olahraga

(*indoor*), atau bangunan gedung lainnya yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta.

15. **Penyedia** adalah pelaku usaha Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Percetakan adalah Perusahaan Pencetak Surat Suara secara massal dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak. Pencetakan sendiri adalah proses industri untuk memproduksi Surat Suara secara massal, dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak. Untuk memudahkan pembahasan, buku ini menggunakan terminologi **Penyedia** saja.
16. **Pengiriman** adalah pengangkutan/penyaluran Logistik Pemilu dari tempat produksi ke tempat penyimpanan/gudang KPU Kabupaten/Kota.
17. **Pendistribusian** adalah pengangkutan/penyaluran Logistik Pemilu dari tempat penyimpanan/gudang KPU Kabupaten/Kota ke TPS atau sebaliknya.
18. Perusahaan pengangkutan/penyaluran selanjutnya disebut **Pengangkut**.
19. Alat transportasi pengangkutan/penyaluran selanjutnya disebut **Moda Pengangkutan**.
20. **Inventarisasi** adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Logistik Pemilu.
21. WMS adalah **Warehouse Management System**, suatu perangkat lunak yang menolong proses manajemen pergudangan, mulai dari perencanaan, proses pesanan, penjadwalan kegiatan pergudangan, persiapan tenaga kerja, dan persiapan aktivitas bernilai tambah.
22. TMS adalah **Transportation Management System**, suatu perangkat lunak yang menolong proses distribusi, termasuk perencanaan, penjadwalan, pemilihan rute, optimalisasi biaya, administrasi surat jalan, dan tagihan angkutan. TMS umumnya terkoneksi dengan WMS.
23. Perangkat **Geotagging** adalah perangkat keras yang mampu melakukan update lokasi Logistik Pemilu selama proses pengangkutan/pengiriman.
24. **Kepala Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilu** dapat dijabat oleh Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Logistik Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar krusial dalam keberhasilan penyelenggaraan demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Ketepatan jumlah, jenis, kualitas, waktu, dan tujuan dalam pendistribusian perlengkapan pemungutan suara secara langsung memengaruhi kelancaran hak pilih warga negara. Mengingat kompleksitas geografis dan skala penyelenggaraan Pemilu yang besar, pengelolaan logistik menghadapi berbagai tantangan administratif maupun operasional yang tinggi. Pengelolaan logistik Pemilu mencakup rangkaian proses yang panjang dan saling terkait, mulai dari perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, produksi, pengiriman, penyimpanan di gudang, distribusi hingga ke tingkat TPS, sampai dengan pemusnahan logistik yang berlebih, serta penanganan khusus pada kondisi force majeure/bencana.

Kompleksitas rantai logistik tersebut membuka peluang terjadinya berbagai risiko, seperti keterlambatan, kekurangan atau kelebihan jumlah, kerusakan, maupun penyimpangan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme monitoring yang sistematis dan terstandar di setiap tahapan pengelolaan logistik Pemilu, sebagaimana diatur antara lain dalam Keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Logistik Pemilu, agar seluruh proses dapat diawasi, dievaluasi, dan diperbaiki secara berkelanjutan.

Selain hal tersebut seiring dengan semangat transformasi digital menuju Pemilu 4.0, pemanfaatan teknologi informasi menjadi sebuah keniscayaan. Modernisasi sistem melalui otomatisasi data dan pengawasan digital diharapkan dapat meminimalisir potensi kesalahan manusia (human error), mempercepat alur informasi, serta mengoptimalkan efisiensi manajemen pergudangan dan distribusi.

Untuk memastikan seluruh tahapan logistik tersebut berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan, diperlukan fungsi pemantauan (monitoring), evaluasi, dan pelaporan yang ketat. Oleh karena itu, penyusunan tata laksana

yang baku dan komprehensif menjadi instrumen penting agar setiap personel di lapangan memiliki acuan kerja yang seragam, terukur, dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

Buku panduan ini disusun untuk memberikan acuan yang jelas dan terstruktur mengenai bagaimana menyusun pelaporan logistik Pemilu yang dilaksanakan pada setiap tahapan, dengan merujuk pada kerangka pertanyaan dasar: apa itu laporan logistik Pemilu, mengapa diperlukan penyusunan laporan logistik Pemilu, bagaimana menyusun laporan logistik Pemilu, apa saja yang dilaporkan, siapa yang menyusun pelaporan logistik Pemilu, kapan dilaksanakan penyusunan laporan logistik Pemilu, di mana dilaksanakan penyusunan laporan logistik Pemilu, dan apa output/hasil yang diharapkan dari kegiatan penyusunan laporan tersebut.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Buku panduan ini disusun sebagai acuan operasional bagi seluruh pihak yang berwenang dalam pelaksanaan penyusunan laporan tata kelola logistik Pemilu dari tahapan perencanaan, produksi, pengelolaan, penyimpanan, dan pendistribusian Logistik Pemilu bagi jajaran KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN dalam melaksanakan pengelolaan logistik Pemilu secara konsisten dan terstandar di seluruh tahapan.

Penyusunan buku panduan ini dimaksudkan untuk mendokumentasi dan melaporkan pelaksanaan tata kelola Logistik Pemilu secara tertib, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga seluruh Logistik Pemilu dapat diterima oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara dalam keadaan tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan, dan tepat waktu.

Buku panduan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman yang seragam dalam pelaksanaan penyusunan laporan logistik Pemilu di setiap tahapan pengelolaan logistik;
2. Meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan akuntabilitas pengelolaan logistik Pemilu;

3. Mendeteksi secara dini potensi risiko dan penyimpangan dalam pengelolaan logistik Pemilu;
4. Menjadi dasar perbaikan berkelanjutan atas sistem pengelolaan logistik Pemilu pada penyelenggaraan berikutnya.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup buku panduan ini menjabarkan pelaksanaan penyusunan laporan seluruh tahapan pengelolaan logistik Pemilu, yaitu: perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, produksi, pengiriman, tata kelola tempat penyimpanan/gudang, pemusnahan logistik, distribusi, serta penanganan logistik pada kondisi *force major*/bencana, mulai dari tingkat KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, hingga PPK, PPS, KPPS, dan PPLN.

Buku panduan ini mengatur standar penyusunan laporan tata kelola logistik Pemilu dengan penjabaran pada unsur operasional dan substantif, unsur Manajemen Tata Kelola & Kelembagaan, unsur akuntabilitas dan administrasi, Unsur Manajemen Risiko & Mitigasi Kendala (*Contingency & SLA*) proses evaluasi logistik Pemilu secara menyeluruh.

1.4 Hasil Yang Di Harapkan

Hasil yang diharapkan dalam buku panduan ini adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya penyusunan logistik Pemilu secara konsisten pada setiap tahapan pengelolaan logistik Pemilu;
2. Tersedianya data dan dokumentasi laporan logistik Pemilu yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan tata kelola logistik yang berkelanjutan;
3. Meningkatnya ketepatan jenis, jumlah, kualitas, waktu, sasaran, efisien logistik Pemilu yang sampai ke TPS;
4. Terdeteksinya potensi kekurangan, kerusakan, atau keterlambatan logistik sedini mungkin;
5. Berkurangnya risiko penyimpangan dan permasalahan dalam pengelolaan logistik Pemilu.

BAB 2

LAPORAN LOGISTIK PEMILU

- 2.1 Pengertian laporan logistik Pemilu**
- 2.2 Perlu nya penyusunan laporan logistik Pemilu**
- 2.3 Tahapan logistik Pemilu apa saja yang perlu dilaporkan**
- 2.4 Siapa yang menyusun pelaporan logistik Pemilu**
- 2.5 Kapan dilaksanakan penyusunan laporan logistik Pemilu**
- 2.6 Dimana dilaksanakan penyusunan laporan logistik Pemilu**
- 2.7 Bagaimana metode penyusunan laporan logistik Pemilu**
- 2.8 Apa output/hasil dari laporan logistik Pemilu**

BAB 3
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
LAPORAN TATA KELOLA LOGISTIK PEMILU

**Format 1 Sistematika Penyusunan Laporan Tata Kelola Logistik
Pemilu Tingkat KPU Kabupaten/Kota**

**Format 2 Sistematika Penyusunan Laporan Tata Kelola Logistik
Pemilu Tingkat KPU Provinsi**

**Format 3 Sistematika Penyusunan Laporan Tata Kelola Logistik
Pemilu Tingkat PPLN**

**Format 4 Sistematika Penyusunan Laporan Tata Kelola Logistik
Pemilu Tingkat KPU**

Format 3. Sistematika Penyusunan Laporan Tata Kelola Logistik Pemilu Tingkat KPU Kabupaten/Kota

Sistematika penyusunan laporan Tata Kelola Logistik Pemilu Tingkat KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Laporan

BAB II HASIL PELAKSANAAN

- A. Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu
- B. Pengadaan Logistik Pemilu
- C. Pendistribusian Logistik Pemilu
- D. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu
- E. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara

BAB III EVALUASI

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Penyajian dari sistematika laporan Tata Kelola Logistik Pemilu di tingkat KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

Halaman judul merupakan halaman pertama, diberi nomor “i” tetapi tidak perlu dicantumkan pada halaman tersebut. Halaman judul memuat judul laporan yang ditulis dalam huruf kapital dan diletakkan secara simetris.

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar berada di awal laporan (sebelum daftar isi) dan memuat hal-hal sebagai berikut:

1. ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. menjelaskan maksud dan tujuan penulisan laporan
3. menjelaskan tentang pelaksanaan penulisan laporan;
4. mengemukakan adanya bantuan dan arahan dari pihak-pihak yang berjasa dalam proses penulisan laporan;
5. harapan atas penulisan laporan; dan
6. kesediaan dalam menerima kritik dan saran

DAFTAR ISI

Daftar isi disusun secara teratur menurut nomor halaman yang memuat daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, judul Bab, judul Sub Bab, dan lampiran. Halaman yang mendahului daftar isi tidak perlu dimuat dalam Daftar Isi.

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel diperlukan apabila terdapat lebih dari dua tabel dipakai dalam menyusun laporan. Daftar tabel diketik pada halaman tersendiri.

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar diperlukan apabila terdapat lebih dari dua gambar dipakai dalam menyusun laporan. Daftar Gambar diketik pada halaman tersendiri.

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran diperlukan apabila terdapat lebih dari dua lampiran dipakai dalam menyusun laporan. Daftar Lampiran diketik pada halaman tersendiri.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub Bab ini menjelaskan mengenai landasan hukum kewajiban penyelenggara Pemilu terkait tahapan pengelolaan Logistik Pemilu yang sudah dilaksanakan.

B. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menjelaskan mengenai proses pelaksanaan, hasil dan sasaran yang dicapai.

C. Sistematika Laporan

Sub Bab ini berisi format, susunan, dan urutan pembahasan dalam laporan.

BAB II HASIL PELAKSANAAN

A. Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu

Sub Bab ini mendeskripsikan dan membahas kebutuhan Logistik Pemilu untuk pemungutan dan penghitungan suara serta rencana anggaran biaya Logistik Pemilu yang diadakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2. Jenis-jenis Logistik Pemilu yang dideskripsikan dan dibahas pada Sub Bab ini adalah kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat bantu tuna netra, sampul kubus, sampul biasa, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPR, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPD, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPRD provinsi, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pasangan Calon (DPC), Daftar Calon Tetap

(DCT) Anggota DPR, Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi, dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Adapun format Tabel 1 dan Tabel 2 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas kebutuhan Logistik Pemilu dan rencana anggaran biaya Logistik Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Logistik Pemilu pada Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tabel 1

Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun
pada Pemungutan dan Penghitungan Suara
di Kabupaten/Kota Provinsi

No	Jenis Logistik Pemilu	Kebutuhan Logistik Pemilu di TPS		
		(jumlah)	(satuan)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
dst.				
Jumlah (n)				

Keterangan:

Kolom (5) pada setiap baris = Kolom (3) pada setiap baris : angka pada baris penjumlahan pada Kolom (3) x 100%.

2. Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun

Tabel 2

Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun
KPU Kabupaten/Kota Provinsi

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
dst					

Tabel 2
Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun
KPU Kabupaten/Kota Provinsi

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah				

Keterangan:

1. Kolom (6) = Kolom (3) x Kolom (5); dan
2. Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (6)

B. Pengadaan Logistik Pemilu

Sub Bab ini mendeskripsikan dan membahas proses pengadaan Logistik Pemilu yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. metode pengadaan Logistik Pemilu sebagaimana tercantum pada Tabel 3;
2. efisiensi proses pengadaan Logistik Pemilu sebagaimana tercantum pada Tabel 4;
3. hasil proses pengadaan Logistik Pemilu sebagaimana tercantum pada Tabel 5;
4. beban kerja penyedia Logistik Pemilu sebagaimana tercantum pada Tabel 6; dan
5. efektivitas pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilu sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Adapun format Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6 dan Tabel 7 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas proses pengadaan Logistik Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengadaan Logistik Pemilu

Tabel 3
Metode Pengadaan Logistik Pemilu Tahun
di KPU Kabupaten/Kota Provinsi

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Metode Pengadaa n
		(Jumlah)	(Satuan)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
dst						
	Jumlah					

Keterangan:

Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (5)

2. Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu

Tabel 4
Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun
di KPU Kabupaten/Kota Provinsi

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi	
		(Jumlah)	(Satuan)				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
dst								
	Jumlah							

Keterangan:

- Kolom (8) = Kolom (6) – Kolom (7);
- Kolom (9) = Kolom (8) : kolom (7) x 100 %; dan
- Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (5), Kolom (7) dan Kolom (8)

3. Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu

Tabel 5
Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun
di KPU Kabupaten/Kota Provinsi

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah SPK	Nilai Total SPK (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
dst					
	Jumlah				

Keterangan:

Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (5) dan Kolom (6).

4. Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu

Tabel 6
Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu Tahun
di KPU Kabupaten/Kota Provinsi

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah Penyedia	Beban Kerja Penyedia (%)
		Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
dst					
	Jumlah				

Keterangan:

1. Kolom (6) = (Kolom (3) : Kolom (5) x 100%; dan
2. Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (5)

5. Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu

Tabel 7
Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun
di KPU Kabupaten/Kota Provinsi

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Satuan	Jumlah Produksi	Jumlah Pemenuhan Kekurangan	Efektivitas (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
dst					
	Jumlah				

Keterangan:

Kolom (6) = (Kolom (4) – Kolom (5)) : Kolom (4)

C. Pendistribusian Logistik Pemilu

Sub Bab ini mendeskripsikan dan membahas pendistribusian Logistik Pemilu yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

1. pendistribusian Logistik Pemilu dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Tabel 8;
2. pendistribusian Logistik Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS sebagaimana tercantum pada Tabel 9; dan
3. moda transportasi Logistik Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS sebagaimana tercantum pada Tabel 10.

Format Tabel 8, Tabel 9, dan Tabel 10 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas pendistribusian Logistik Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Pendistribusian Logistik Pemilu dari Penyedia ke Kabupaten/Kota

Tabel 8

Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun dari Penyedia
ke KPU Kabupaten/Kota Provinsi

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kemasan	Satuan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
dst							

Keterangan:

1. Kolom (7) bisa diisi lebih dari 1 item; dan
2. Baris penjumlahan diisi pada Kolom (7).

2. Pendistribusian Logistik Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS

Tabel 9

Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (orang)	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Bukit)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari PPK	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
dst									
	Jumlah								

Keterangan:

Baris penjumlahan diisi pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6) dan Kolom (9); dan

Kolom (7), Kolom (8) dan Kolom (9) dapat diisi lebih dari satu item.

3. Moda Transportasi Logistik Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS

Tabel 10

Moda Transportasi Logistik Pemilu Tahun
sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten/Kota

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi Logistik Pemilu ke					
		PPK		PPS		TPS	
		(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pesawat/Helikopter						
2	Mobil Truck						
3	Mobil Pick up						
4	Sepeda Motor/ Sepeda Kayuh						
5	Speedboard/ Perahu						
6	Kuda/Angkutan Tenaga Hewan						
7	Dipikul/Jalan Kaki						
dst							

Keterangan:

1. Kolom (4) = Kolom (3) setiap baris : Kolom (3) baris penjumlahan x 100%;
2. Kolom (6) = Kolom (5) setiap baris : Kolom (5) baris penjumlahan x 100%; dan
3. Kolom (8) = Kolom (7) setiap baris : Kolom (7) baris penjumlahan x 100%.

D. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu pada KPU Kabupaten/Kota

Sub Bab ini mendeskripsikan dan membahas hasil kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Gudang KPU Kabupaten/Kota meliputi:

1. hasil penyortiran dan penghitungan Logistik Pemilu di Gudang KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Tabel 11; dan
2. kondisi Gudang KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Tabel 12.

Adapun format Tabel 11 dan Tabel 12 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penghitungan dan Penyortiran Logistik Pemilu di Gudang KPU Kabupaten/Kota

Tabel 11
Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun
di Gudang KPU Kabupaten/Kota Provinsi

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/ru sak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
dst										
	Jumlah									

Keterangan:

1. Kolom (6) diisi jika jumlah Kolom (4)/Dipesan lebih besar dari jumlah Kolom (5)/Diterima, Kolom (6) = kolom (4) – kolom (5);
2. Kolom (7) diisi jika jumlah Kolom (5)/Diterima lebih besar dari jumlah Kolom (4)/Dipesan, Kolom (7) = kolom (5) – kolom (4);
3. Kolom (9) = Kolom (5) - Kolom (8);

4. Kolom (10) diisi, jika jumlah Kolom (8)/Baik lebih kecil daripada jumlah Kolom (4)/Dipesan;
5. Kolom (10) = Kolom (4) - Kolom (8); dan
6. Kolom (11) = kolom (10) : kolom (4) x 100%.

2. Kondisi Gudang Logistik Pemilu di KPU Kabupaten/Kota

Tabel 12
Kondisi Gudang Logistik Pemilu Tahun ...
di KPU Kabupaten/Kota Provinsi

No	Kondisi Gudang	Luas (m ²)	Status Kepemilikan						Jangka Waktu (bulan)	
			Milik KPU		Pinjam		Sewa		Pinjam	Sewa
			(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Memadai									
2.	Kurang Memadai									
	Jumlah									

Keterangan:

1. Kolom (5) = Kolom (4) pada setiap baris yang sama : Kolom (4) pada baris penjumlahan x 100%;
2. Kolom (7) = Kolom (6) pada setiap baris yang sama : Kolom (6) pada baris penjumlahan x 100%; dan
3. Kolom (9) = Kolom (8) pada setiap baris yang sama : Kolom (8) pada baris penjumlahan x 100%.

E. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu pada KPU Kabupaten/Kota

Sub Bab ini mendeskripsikan dan membahas hasil pelaksanaan pemusnahan kelebihan surat suara Pemilu yang dilaksanakan di KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Tabel 13 dengan format sebagai berikut:

Tabel 13

Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun
di KPU Kabupaten/Kota Provinsi

No	Jenis Surat Suara	Jumlah yang Dipesan (lembar)	Jumlah Surat Suara yang Diterima (lembar)		Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan	
			Baik	Rusak	(lembar)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
dst						
	Jumlah					

Keterangan:

1. Kolom (6) = Kolom (4) – Kolom (3) + Kolom (5); dan
2. Kolom (7) = Kolom (6) : Kolom (3) x 100%.

BAB III EVALUASI

Bab ini memuat analisa mendalam antara regulasi dan kebijakan KPU dengan kegiatan yang dilaksanakan, permasalahan yang dihadapi, dan langkah pemecahannya, serta hasil pelaksanaan kegiatan. Disamping itu, bab ini juga menjelaskan tentang inovasi/kegiatan yang dilakukan oleh satker KPU Kabupaten/Kota yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tahapan Tata Kelola Logistik Pemilu.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi sejumlah kesimpulan hasil pelaksanaan kegiatan tahapan Tata Kelola Logistik Pemilu. Selain kesimpulan, dapat disampaikan rekomendasi untuk menyempurnakan kegiatan tahapan Tata Kelola Logistik Pemilu berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran memuat dokumen tambahan dapat berupa tabel, gambar, atau teks sebagai data dukung, yang disusun sesuai dengan nomor urut sesuai dengan urutan penyebutannya dalam tubuh laporan

**Format 2. Sistematika Penyusunan Laporan Tata Kelola Logistik
Pemilu Tingkat KPU Provinsi**

Sistematika penyusunan laporan Tata Kelola Logistik Pemilu Tingkat KPU Provinsi sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Laporan

BAB II HASIL PELAKSANAAN

- A. Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu
- B. Pengadaan Logistik Pemilu
- C. Pendistribusian Logistik Pemilu
- D. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu
- E. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara

BAB III EVALUASI

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Penyajian dari sistematika laporan Tata Kelola Logistik Pemilu di tingkat KPU Provinsi sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

Halaman judul merupakan halaman pertama, diberi nomor “i” tetapi tidak perlu dicantumkan pada halaman tersebut. Halaman judul memuat judul laporan yang ditulis dalam huruf kapital dan diletakkan secara simetris.

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar berada di awal laporan (sebelum daftar isi) dan memuat hal-hal sebagai berikut:

1. ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. menjelaskan maksud dan tujuan penulisan laporan
3. menjelaskan tentang pelaksanaan penulisan laporan;
4. mengemukakan adanya bantuan dan arahan dari pihak-pihak yang berjasa dalam proses penulisan laporan;
5. harapan atas penulisan laporan; dan
6. kesediaan dalam menerima kritik dan saran

DAFTAR ISI

Daftar isi disusun secara teratur menurut nomor halaman yang memuat daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, judul Bab, judul Sub Bab, dan lampiran. Halaman yang mendahului daftar isi tidak perlu dimuat dalam Daftar Isi.

DAFTAR TABEL

Daftar tabel diperlukan apabila terdapat lebih dari dua tabel dipakai dalam menyusun laporan. Daftar tabel diketik pada halaman tersendiri.

DAFTAR GAMBAR

Daftar gambar diperlukan apabila terdapat lebih dari dua gambar dipakai dalam menyusun laporan. Daftar gambar diketik pada halaman tersendiri.

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar lampiran diperlukan apabila terdapat lebih dari dua lampiran dipakai dalam menyusun laporan. Daftar lampiran diketik pada halaman tersendiri.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub Bab ini menjelaskan mengenai landasan hukum kewajiban penyelenggara Pemilu terkait tahapan pengelolaan Logistik Pemilu yang sudah dilaksanakan.

B. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menjelaskan mengenai proses pelaksanaan, hasil dan sasaran yang dicapai.

C. Sistematika Laporan

Sub Bab ini berisi format, susunan dan urutan pembahasan dalam laporan.

BAB II HASIL PELAKSANAAN

A. Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu

Sub Bab ini mendeskripsikan dan membahas kebutuhan Logistik Pemilu dan rencana anggaran biaya Logistik Pemilu pada pemungutan dan penghitungan suara yang diadakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2. Jenis-jenis Logistik Pemilu yang dideskripsikan dan dibahas pada Sub Bab ini adalah kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat bantu tuna netra, sampul kubus, sampul biasa, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPR, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPD, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPRD provinsi, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, Salinan DPT,

Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pasangan Calon (DPC), Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi, dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Adapun format Tabel 1 dan Tabel 2 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas kebutuhan Logistik Pemilu dan rencana anggaran biaya Logistik Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Logistik Pemilu pada Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tabel 1
Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun
pada Pemungutan dan Penghitungan Suara
Provinsi

No	Jenis Logistik Pemilu	Satuan	Kebutuhan Logistik Pemilu di TPS		
			(jumlah)	(satuan)	(%)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
1.					
dst.					
	Jumlah				

Keterangan:

Kolom (5) pada setiap baris = Kolom (3) pada setiap baris : angka pada baris penjumlahan pada Kolom (3) x 100%.

2. Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu

Tabel 2
Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun
Provinsi

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	KPU Provinsi				
1.					
dst					
	Jumlah B				
B.	KPU Kabupaten/Kota				
1.					
dst					
	Jumlah B				
	Jumlah A + B				

Keterangan:

1. Kolom (6) = Kolom (3) x Kolom (5); dan
2. Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (6)

B. Pengadaan Logistik Pemilu

Sub Bab ini mendeskripsikan dan membahas proses pengadaan Logistik Pemilu yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. metode pengadaan Logistik Pemilu sebagaimana tercantum pada Tabel 3;
2. efisiensi proses pengadaan Logistik Pemilu sebagaimana tercantum pada Tabel 4;
3. hasil proses pengadaan Logistik Pemilu sebagaimana tercantum pada Tabel 5;
4. beban kerja penyedia Logistik Pemilu sebagaimana tercantum pada Tabel 6; dan

5. efektivitas pemenuhan Logistik Pemilu sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Adapun format Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6 dan Tabel 7 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas proses pengadaan Logistik Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengadaan Logistik Pemilu

Tabel 3
Metode Pengadaan Logistik Pemilu Tahun
Provinsi

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Metode Pengadaan
		(Jumlah)	(Satuan)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	KPU Provinsi					
1.						
dst						
	Jumlah A					
B.	KPU Kabupaten/Kota					
1.						
dst						
	Jumlah B					
	Jumlah A + B					

Keterangan:

Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (5)

2. Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu

Tabel 4
Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun
Provinsi

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi	
		(Jumlah)	(Satuan)				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	KPU Provinsi							
1.								
dst								
	Jumlah A							
B.	KPU Kab/Kota							
1.								
dst								
	Jumlah B							
	Jumlah A + B							

Keterangan:

1. Kolom (8) = Kolom (6) – Kolom (7);
2. Kolom (9) = Kolom (8) : kolom (7) x 100 %; dan
3. Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (5), Kolom (7) dan Kolom (8)

3. Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu

Tabel 5
Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun
Provinsi

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah SPK	Nilai Total SPK (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	KPU Provinsi				
1.					
dst					
	Jumlah A				
B.	KPU Kabupaten/Kota				
1.					
dst					

Tabel 5
Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun
Provinsi

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah SPK	Nilai Total SPK (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah B				
	Jumlah A + B				

Keterangan:

Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (5) dan Kolom (6).

4. Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu

Tabel 6
Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu Tahun Provinsi

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah Penyedia	Beban Kerja Penyedia (%)
		(Jumlah)	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	KPU Provinsi				
1.					
dst					
	Jumlah A				
B.	KPU Kabupaten/Kota				
1.					
dst					
	Jumlah B				
	Jumlah A + B				

Keterangan:

1. Kolom (6) = (Kolom (3) : Kolom (5) x 100%; dan
2. Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (5)

5. Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu

Tabel 7
Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Satuan	Jumlah Produksi	Jumlah Pemenuhan Kekurangan	Efektivitas (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
dst					
	Jumlah				

Keterangan:

Kolom (6) = (Kolom (4) – Kolom (5)) : Kolom (4) x 100%

C. Pendistribusian Logistik Pemilu

Sub Bab ini mendeskripsikan dan membahas pendistribusian Logistik Pemilu yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

1. pendistribusian Logistik Pemilu dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Tabel 8;
2. pendistribusian Logistik Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota ke Tempat Pemungutan Suara sebagaimana tercantum pada Tabel 9; dan
3. moda transportasi Logistik Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota ke Tempat Pemungutan Suara sebagaimana tercantum pada Tabel 10.

Format Tabel 8, Tabel 9, dan Tabel 10 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas pendistribusian Logistik Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Pendistribusian Logistik Pemilu dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota

Tabel 8
Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun
dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota
Provinsi

Jenis Logistik:

No	KPU Kabupaten/ Kota	Jumlah		Jumlah Kemasan	Satuan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan	Kendala
		TPS	Pemilih (orang)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
dst									
	Jumlah								

Keterangan:

1. Kolom (9) bisa diisi lebih dari 1 item; dan
2. Baris penjumlahan diisi pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5) dan Kolom (9).

2. Pendistribusian Logistik Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS

Tabel 9
Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS
Provinsi

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (orang)	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
dst									
	Jumlah								

Keterangan:

1. Kolom (7), Kolom (8) dan Kolom (9) bisa diisi lebih dari 1 item; dan
2. Baris penjumlahan diisi pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6) dan Kolom (9).

3. Moda Transportasi Logistik Pemilu sampai ke TPS

Tabel 10

Moda Transportasi Logistik Pemilu Tahun
sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Provinsi

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi Logistik Pemilu ke							
		Kab/Kota		PPK		PPS		TPS	
		(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pesawat/Helikopter								
2	Mobil Truck								
3	Mobil Pick up								
4	Sepeda Motor/ Sepeda Kayuh								
5	Speedboat/ Perahu								
6	Kuda/Angkutan Tenaga Hewan								
7	Dipikul/Jalan Kaki								
dst									
	Jumlah								

Keterangan:

1. Kolom (4) = Kolom (3) setiap baris : Kolom (3) baris penjumlahan x 100%;
2. Kolom (6) = Kolom (5) setiap baris : Kolom (5) baris penjumlahan x 100%;
3. Kolom (8) = Kolom (7) setiap baris : Kolom (7) baris penjumlahan x 100%; dan
4. Kolom (10) = Kolom (9) setiap baris : Kolom (9) baris penjumlahan x 100%.

D. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu

Sub Bab ini mendeskripsikan dan membahas hasil kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu yang dilakukan oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing KPU Provinsi, yang dilakukan di gudang KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

1. hasil penyortiran dan penghitungan Logistik Pemilu di gudang KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Tabel 11; dan
2. kondisi gudang KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Tabel 12.

Adapun format Tabel 11 dan Tabel 12 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas hasil kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu di Gudang KPU Kabupaten/Kota

Tabel 11
Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun
di KPU Kabupaten/Kota di Provinsi

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
dst										
	Jumlah									

Keterangan:

1. Kolom (6) diisi jika jumlah Kolom (4)/Dipesan lebih besar dari jumlah Kolom (5)/Diterima, Kolom (6) = kolom (4) – kolom (5);
2. Kolom (7) diisi jika jumlah Kolom (5)/Diterima lebih besar dari jumlah Kolom (4)/Dipesan, Kolom (7) = kolom (5) – kolom (4);
3. Kolom (9) = Kolom (5) - Kolom (8);
4. Kolom (10) diisi, jika jumlah Kolom (8)/Baik lebih kecil daripada jumlah Kolom (4)/Dipesan;
5. Kolom (10) = Kolom (4) - Kolom (8); dan

6. Kolom (11) = kolom (10) : kolom (4) x 100%.

2. Kondisi Gudang Logistik Pemilu di KPU Kabupaten/Kota

Tabel 12

Kondisi Gudang Logistik Pemilu di KPU Kabupaten/Kota

Tahun di Provinsi

No	Kondisi Gudang	Status Kepemilikan						Jangka Waktu (bulan)	
		Milik KPU		Pinjam		Sewa		Pinjam	Sewa
		(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Memadai								
2.	Kurang Memadai								
	Jumlah								

Keterangan:

1. Kolom (4) = Kolom (3) pada setiap baris : Kolom (3) pada baris penjumlahan x 100%;
2. Kolom (6) = Kolom (5) pada setiap baris : Kolom (5) pada baris penjumlahan x 100%; dan
3. Kolom (8) = Kolom (7) pada setiap baris : Kolom (7) pada baris penjumlahan x 100%.

E. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu

Sub Bab ini mendeskripsikan dan membahas hasil pelaksanaan pemusnahan kelebihan surat suara Pemilu yang dilaksanakan di Percetakan dan gudang KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

1. pemusnahan kelebihan surat suara di Percetakan sebagaimana tercantum pada Tabel 13; dan
2. pemusnahan kelebihan surat suara di KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Tabel 14.

Adapun format Tabel 13 dan Tabel 14 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas kegiatan pemusnahan kelebihan surat suara Pemilu adalah sebagai berikut:

1. pemusnahan kelebihan surat suara di Percetakan

Tabel 13

Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun
di Percetakan di Provinsi

No	Jenis Surat Suara	Jumlah yang Dipesan (lembar)	Jumlah yang Diproduksi (lembar)	Jumlah yang Dikirim (lembar)	Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan	
					(lembar)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
dst						
	Jumlah					

Keterangan:

1. Kolom (6) = Kolom (4) – Kolom (5); dan
2. Kolom (7) = Kolom (6) : Kolom (3) x 100%.

2. pemusnahan kelebihan surat suara di KPU Kabupaten/Kota

Tabel 14
Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun
di KPU Kabupaten/Kota di Provinsi

No	Jenis Surat Suara	Jumlah yang Dipesan (lembar)	Jumlah Surat Suara yang Diterima (lembar)		Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan	
			Baik	Rusak	(lembar)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
dst						
	Jumlah					

Keterangan:

1. Kolom (6) = Kolom (4) – Kolom (3) + Kolom (5); dan
2. Kolom (7) = Kolom (6) : Kolom (3) x 100%.

BAB III EVALUASI

Bab ini memuat analisa mendalam antara regulasi dan kebijakan KPU dengan kegiatan yang dilaksanakan, permasalahan yang dihadapi dan langkah pemecahannya, serta hasil pelaksanaan kegiatan. Disamping itu, Bab ini juga menjelaskan tentang inovasi/kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tahapan Tata Kelola Logistik Pemilu.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi sejumlah kesimpulan hasil pelaksanaan kegiatan tahapan Tata Kelola Logistik Pemilu. Selain kesimpulan, dapat disampaikan rekomendasi untuk menyempurnakan kegiatan tahapan Tata Kelola Logistik Pemilu berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran memuat dokumen tambahan dapat berupa tabel, gambar, atau teks sebagai data dukung, yang disusun sesuai dengan nomor urut sesuai dengan urutan penyebutannya dalam tubuh laporan.

Format 4. Sistematika Penyusunan Laporan Tata Kelola Logistik Pemilu
Tingkat PPLN

Sistematika penyusunan laporan Tata Kelola Logistik Pemilu Tingkat PPLN sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Laporan

BAB II HASIL PELAKSANAAN

- A. Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu
- B. Pengadaan Logistik Pemilu
- C. Pendistribusian Logistik Pemilu
- D. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu
- E. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu

BAB III EVALUASI

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Penyajian dari sistematika laporan Tata Kelola Logistik Pemilu di tingkat PPLN sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

Halaman judul merupakan halaman pertama, diberi nomor “i” tetapi tidak perlu dicantumkan pada halaman tersebut. Halaman judul memuat judul laporan yang ditulis dalam huruf kapital dan diletakkan secara simetris.

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar berada di awal laporan (sebelum daftar isi) dan memuat hal-hal sebagai berikut:

1. ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. menjelaskan maksud dan tujuan penulisan laporan
3. menjelaskan tentang pelaksanaan penulisan laporan;
4. mengemukakan adanya bantuan dan arahan dari pihak-pihak yang berjasa dalam proses penulisan laporan;
5. harapan atas penulisan laporan; dan
6. kesediaan dalam menerima kritik dan saran

DAFTAR ISI

Daftar isi disusun secara teratur menurut nomor halaman yang memuat daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, judul B serta Sub Bab, dan lampiran. Halaman yang mendahului daftar isi tidak perlu dimuat dalam Daftar Isi.

DAFTAR TABEL

Daftar tabel diperlukan apabila terdapat lebih dari dua tabel dipakai dalam menyusun laporan. Daftar tabel diketik pada halaman tersendiri.

DAFTAR GAMBAR

Daftar gambar diperlukan apabila terdapat lebih dari dua gambar dipakai dalam menyusun laporan. Daftar gambar diketik pada halaman tersendiri.

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar lampiran diperlukan apabila terdapat lebih dari dua lampiran dipakai dalam menyusun laporan. Daftar lampiran diketik pada halaman tersendiri.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub Bab ini menjelaskan mengenai landasan hukum kewajiban penyelenggara Pemilu terkait tahapan pengelolaan Logistik Pemilu yang sudah dilaksanakan.

B. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menjelaskan mengenai proses pelaksanaan, hasil dan sasaran yang dicapai dari laporan.

C. Sistematika Laporan

Sub Bab ini berisi format, susunan, dan urutan pembahasan dalam laporan.

BAB II HASIL PELAKSANAAN

A. Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu

Sub Bab ini mendeskripsikan dan membahas kebutuhan Logistik Pemilu pada pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri dan rencana anggaran biaya Logistik Pemilu yang diadakan oleh PPLN sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2. Jenis-jenis Logistik Pemilu yang dideskripsikan dan dibahas pada Sub Bab ini antara lain adalah kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan, alat bantu tuna netra, sampul kubus, sampul biasa, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPR, Salinan DPTLN, Salinan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN), Daftar Pasangan Calon (DPC), dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Dapil DKI Jakarta II.

Adapun format Tabel 1 dan Tabel 2 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas kebutuhan logistik Pemilu dan rencana anggaran biaya logistik Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Logistik Pemilu pada Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Tabel 1
Kebutuhan Logistik Pemilu Luar Negeri Tahun
pada Pemungutan dan Penghitungan Suara
di PPLN

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilu Luar Negeri						
		TPSLN		KSK		Pos		Jumlah
		(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
dst								
.								
Jumlah (n)								
(%)								

Keterangan:

1. Kolom (4) = Kolom (3) pada setiap baris yang sama : Kolom (9) pada setiap baris yang sama x 100%;
2. Kolom (6) = Kolom (5) pada setiap baris yang sama : Kolom (9) pada setiap baris yang sama x 100%; dan
3. Kolom (8) = Kolom (7) pada setiap baris yang sama : Kolom (9) pada setiap baris yang sama x 100%.

2. Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun

Tabel 2
Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Luar Negeri Tahun
di PPLN

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
dst					
	Jumlah				

Keterangan:

1. Kolom (6) = Kolom (3) x Kolom (5); dan
2. Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (6)

B. Pengadaan Logistik Pemilu

Sub Bab ini mendeskripsikan dan membahas proses pengadaan Logistik Pemilu yang dilakukan oleh PPLN, meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. metode pengadaan Logistik Pemilu sebagaimana tercantum pada Tabel 3;
2. efisiensi proses pengadaan Logistik Pemilu sebagaimana tercantum pada Tabel 4;
3. hasil proses pengadaan Logistik Pemilu sebagaimana tercantum pada Tabel 5;
4. beban kerja penyedia Logistik Pemilu sebagaimana tercantum pada Tabel 6; dan
5. efektivitas pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilu sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Adapun format Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas proses pengadaan Logistik Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengadaan Logistik Pemilu

Tabel 3
Metode Pengadaan Logistik Pemilu Luar Negeri Tahun
di PPLN

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Metode Pengadaa n
		(Jumlah)	(Satuan)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
dst						
	Jumlah					

Keterangan:

Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (5)

2. Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu

Tabel 4
Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun
di PPLN

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi	
		(Jumlah)	(Satuan)				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
dst.								
	Jumlah							

Keterangan:

1. Kolom (8) = Kolom (6) – Kolom (7);
2. Kolom (9) = Kolom (8) : kolom (7) x 100 %; dan
3. Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (5), Kolom (7) dan Kolom (8)

3. Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu

Tabel 5
Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun
di PPLN

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah SPK	Nilai Total SPK (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
dst					
	Jumlah				

Keterangan:

Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (5) dan Kolom (6).

4. Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu pada PPLN

Tabel 6
Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu Luar Negeri Tahun
di PPLN

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah Penyedia	Beban Kerja Penyedia (%)
		Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
dst					

Tabel 6
Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu Luar Negeri Tahun
di PPLN

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah Penyedia	Beban Kerja Penyedia (%)
		Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah				

Keterangan:

1. Kolom (6) = (Kolom (3) : Kolom (5) x 100%; dan
2. Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (5)

5. Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu pada PPLN

Tabel 7
Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu Luar Negeri
Tahun ... di PPLN ...

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Satuan	Jumlah Produksi	Jumlah Pemenuhan Kekurangan	Efektivitas (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
dst					
	Jumlah				

Keterangan:

Kolom (6) = (Kolom (4) – Kolom (5)) : Kolom (4)

C. Pendistribusian Logistik Pemilu pada PPLN

Sub Bab ini mendeskripsikan dan membahas pendistribusian Logistik Pemilu yang dilakukan oleh PPLN, meliputi:

1. pendistribusian Logistik Pemilu dari PPLN melalui KPPSLN sebagaimana tercantum pada Tabel 8; dan

2. moda transportasi Logistik Pemilu dari PPLN ke KPPSLN TPSLN, KPPSLN KSK dan KPPSLN pos sebagaimana tercantum pada Tabel 9.

Format Tabel 8 dan Tabel 9 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas pendistribusian Logistik Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Pendistribusian Logistik Pemilu dari PPLN ke KPPSLN

Tabel 8
Pendistribusian Logistik Pemilu Luar Negeri
Tahun di PPLN

No	KPPSLN	Jumlah Pemilih	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkusan)	Tanggal Pengiriman dari PPLN	Tanggal Ketibaan di KPPSLN	Moda Angkutan	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KPPSLN TPSLN/ KSK/Pos							
dst								
	Jumlah							

Keterangan:

Baris penjumlahan diisi pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), dan Kolom (8).

Kolom (8) bisa diisi lebih dari 1 jenis moda angkutan

2. Moda Transportasi Logistik Pemilu dari PPLN ke KPPSLN

Tabel 9

Moda Transportasi Logistik Pemilu Luar Negeri Tahun
dari PPLN ke KPPSLN

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi Logistik Pemilu ke KPPSLN					
		TPSLN		KSK		Pos	
		(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pesawat/Helikopter						
2	Mobil Truck						
3	Mobil Pick up						
4	Sepeda Motor/ Sepeda Kayuh						
5	Speedboat/ Perahu						
6	Kuda/Angkutan Tenaga Hewan						
7	Dipikul/Jalan Kaki						
dst							
	Jumlah						

Keterangan:

1. Kolom (4) = Kolom (3) setiap baris yang sama : Kolom (3) baris penjumlahan x 100%;
2. Kolom (6) = Kolom (5) setiap baris yang sama : Kolom (5) baris penjumlahan x 100%; dan

3. Kolom (8) = Kolom (7) setiap baris yang sama : Kolom (7) baris penjumlahan x 100%.

D. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu pada PPLN

Sub Bab ini mendeskripsikan dan membahas hasil kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu yang dilakukan oleh PPLN di Gudang PPLN, meliputi:

1. penerimaan logistik Pemilu dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Tabel 10;
2. hasil penyortiran dan penghitungan Logistik Pemilu di Gudang PPLN sebagaimana tercantum pada Tabel 11; dan
3. kondisi Gudang PPLN sebagaimana tercantum pada Tabel 12.

Adapun format Tabel 10, Tabel 11, dan Tabel 12 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu adalah sebagai berikut:

4. Penerimaan Logistik Pemilu dari Kantor Perwakilan RI

Tabel 10

Penerimaan Logistik Pemilu oleh PPLN
dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia

No	Tahapan	Jumlah Kantong Diplomatik berisi Logistik Pemilu	Penerimaan		Keterangan
			Tempat	Tanggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kesatu				
dst					

Keterangan:

Baris penjumlahan diisi pada Kolom (3)

5. Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu di PPLN

Tabel 11
Hasil Penghitungan dan Penyortiran Logistik Pemilu Luar Negeri Tahun
di Gudang PPLN

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
dst										
	Jumlah									

Keterangan:

- Kolom (6) diisi jika jumlah Kolom (4)/Dipesan lebih besar dari jumlah Kolom (5)/Diterima, Kolom (6) = kolom (4) – kolom (5);
- Kolom (7) diisi jika jumlah Kolom (5)/Diterima lebih besar dari jumlah Kolom (4)/Dipesan, Kolom (7) = kolom (5) – kolom (4);
- Kolom (9) = Kolom (5) – Kolom (8);
- Kolom (10) diisi, jika jumlah Kolom (8)/Baik lebih kecil daripada jumlah Kolom (4)/Dipesan;
- Kolom (10) = Kolom (4) – Kolom (8); dan
- Kolom (11) = kolom (10) : kolom (4) x 100%.

6. Kondisi Gudang Logistik Pemilu di PPLN

Tabel 12
Kondisi Gudang Logistik Pemilu Luar Negeri
Tahun di PPLN

No	Kondisi Gudang	Luas (m ²)	Status Kepemilikan						Jangka Waktu (bulan)	
			Milik Kantor Perwakilan RI		Pinjam		Sewa		Pinjam	Sewa
			(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Memadai									
2.	Kurang Memadai									
	Jumlah									

Keterangan:

1. Kolom (5) = Kolom (4) pada setiap baris yang sama Kolom (5) : Kolom (4) pada baris penjumlahan;
 2. Kolom (7) = Kolom (6) pada setiap baris yang sama Kolom (7) : Kolom (6) pada baris penjumlahan; dan
 3. Kolom (9) = Kolom (8) pada setiap baris yang sama Kolom (9) : Kolom (8) pada baris penjumlahan.
- E. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu di PPLN

Sub Bab ini mendeskripsikan dan membahas hasil pelaksanaan pemusnahan kelebihan surat suara Pemilu yang dilaksanakan di gudang PPLN sebagaimana tercantum pada Tabel 13.

Adapun format Tabel 13 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas kegiatan pemusnahan kelebihan surat suara Pemilu adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Luar Negeri Tahun
....
Di Gudang PPLN

No	Jenis Surat Suara	Jumlah yang Dipesan (lembar)	Jumlah Surat Suara yang Diterima (lembar)		Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan	
			Baik	Rusak	(lembar)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
dst						
	Jumlah					

Keterangan:

1. Kolom (6) = Kolom (4) – Kolom (3) + Kolom (5); dan
2. Kolom (7) = Kolom (6) : Kolom (3) x 100%.

BAB III EVALUASI

Bab ini memuat analisa mendalam antara regulasi dan kebijakan KPU dengan kegiatan yang dilaksanakan, permasalahan yang dihadapi dan langkah pemecahannya, serta hasil pelaksanaan kegiatan. Disamping itu, Bab ini juga menjelaskan tentang inovasi/kegiatan yang dilakukan oleh PPLN yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tahapan Tata Kelola Logistik Pemilu.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi sejumlah kesimpulan hasil pelaksanaan kegiatan tahapan Tata Kelola Logistik Pemilu. Selain kesimpulan, dapat disampaikan rekomendasi untuk menyempurnakan kegiatan tahapan Tata Kelola Logistik Pemilu berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran memuat dokumen tambahan dapat berupa tabel, gambar atau teks sebagai data dukung, yang disusun sesuai dengan nomor urut sesuai dengan urutan penyebutannya dalam tubuh laporan.

Format 1. Sistematika Penyusunan Laporan Tata Kelola Logistik Pemilu
Tingkat KPU

Sistematika penyusunan laporan Tata Kelola Logistik Pemilu Tingkat KPU sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Laporan

BAB II HASIL PELAKSANAAN

- A. Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu
- B. Pengadaan Logistik Pemilu
- C. Pendistribusian Logistik Pemilu
- D. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu
- E. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara

BAB III EVALUASI

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Penyajian dari sistematika laporan Tata Kelola Logistik Pemilu di tingkat KPU sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

Halaman judul merupakan halaman pertama, diberi nomor “i” tetapi tidak perlu dicantumkan pada halaman tersebut. Halaman judul memuat judul laporan yang ditulis dalam huruf kapital dan diletakkan secara simetris.

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar berada di awal laporan (sebelum daftar isi) dan memuat hal-hal sebagai berikut:

1. ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. menjelaskan maksud dan tujuan penulisan laporan
3. menjelaskan tentang pelaksanaan penulisan laporan;
4. mengemukakan adanya bantuan dan arahan dari pihak-pihak yang berjasa dalam proses penulisan laporan;
5. harapan atas penulisan laporan; dan
6. kesediaan dalam menerima kritik dan saran.

DAFTAR ISI

Daftar isi disusun secara teratur menurut nomor halaman yang memuat daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, judul Bab, judul Sub Bab, dan lampiran. Halaman yang mendahului daftar isi tidak perlu dimuat dalam Daftar Isi.

DAFTAR TABEL

Daftar tabel diperlukan apabila terdapat lebih dari dua tabel dipakai dalam menyusun laporan. Daftar tabel diketik pada halaman tersendiri.

DAFTAR GAMBAR

Daftar gambar diperlukan apabila terdapat lebih dari dua gambar dipakai dalam menyusun laporan. Daftar gambar diketik pada halaman tersendiri.

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar lampiran diperlukan apabila terdapat lebih dari dua lampiran dipakai dalam menyusun laporan. Daftar lampiran diketik pada halaman tersendiri.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub Bab ini menjelaskan mengenai landasan hukum kewajiban penyelenggara Pemilu terkait tahapan pengelolaan Logistik Pemilu yang sudah dilaksanakan.

B. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menjelaskan mengenai proses pelaksanaan, hasil dan sasaran yang dicapai.

C. Sistematika Laporan

Sub Bab ini berisi format, susunan, dan urutan pembahasan dalam laporan.

BAB II HASIL PELAKSANAAN

A. Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu

Sub Bab ini mendeskripsikan dan membahas kebutuhan Logistik Pemilu dan rencana anggaran biaya Logistik Pemilu pada pemungutan dan penghitungan suara yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2. Jenis-jenis Logistik Pemilu yang dideskripsikan dan dibahas pada Sub Bab ini adalah kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat bantu tuna netra, sampul kubus, sampul biasa, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPR, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPD, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPRD provinsi, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pasangan Calon (DPC), Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Adapun format Tabel 1 dan Tabel 2 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas kebutuhan Logistik Pemilu dan rencana anggaran biaya Logistik Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Logistik Pemilu pada Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tabel 1
Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun pada
Pemungutan dan Penghitungan Suara

No	Jenis Logistik Pemilu	Satuan	Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilu								
			TPS		TPSLN		KSK		Pos		Jumla h
			(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
dst											

Keterangan:

1. Kolom (5) – Kolom (4) : Kolom 12 x 100%, pada baris yang sama;
2. Kolom (7) – Kolom (6) : Kolom 12 x 100%, pada baris yang sama;
3. Kolom (9) – Kolom (8) : Kolom 12 x 100%, pada baris yang sama; dan
4. Kolom (11) – Kolom (10) : Kolom 12 x 100%, pada baris yang sama.

2. Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu

Tabel 2
Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	KPU				
A.1	Dalam Negeri				
1.					
dst					
	Jumlah A.1				
A.2	Luar Negeri				
1.					
dst					
	Jumlah A.2				

Tabel 2
Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah A (A.1 + A.2)				
B.	KPU Provinsi				
1.					
dst					
	Jumlah B				
C.	KPU Kabupaten/Kota				
1.					
dst					
	Jumlah C				
D.	PPLN				
1.					
dst.					
	Jumlah D				
	Jumlah A + B + C + D				

Keterangan:

1. Kolom (6) = Kolom (3) x Kolom (5); dan
2. Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (6)

B. Pengadaan Logistik Pemilu

Sub Bab ini mendeskripsikan dan membahas proses pengadaan Logistik Pemilu yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN, meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. metode pengadaan Logistik Pemilu sebagaimana tercantum pada Tabel 3;
2. efisiensi proses pengadaan Logistik Pemilu sebagaimana tercantum pada Tabel 4;
3. hasil proses pengadaan Logistik Pemilu sebagaimana tercantum pada Tabel 5;
4. beban kerja penyedia Logistik Pemilu sebagaimana tercantum pada Tabel 6; dan

5. efektivitas pemenuhan Logistik Pemilu sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Data pada format Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6 dan Tabel 7 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas proses pengadaan Logistik Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengadaan Logistik Pemilu

Tabel 3
Metode Pengadaan Logistik Pemilu Tahun

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Metode Pengadaaan
		(Jumlah)	(Satuan)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	KPU					
A. 1	Dalam Negeri					
1.						
dst						
	Jumlah A.1					
A. 2	Luar Negeri					
1.						
dst						
	Jumlah A.2					
	Jumlah A (A.1 + A.2)					
B.	KPU Provinsi					
1.						
dst						
	Jumlah B					
C.	KPU Kabupaten/Kota					
1.						
dst						
	Jumlah C					
D.	PPLN					
1.						
dst						
	Jumlah A + B + C + D					

Keterangan:

Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (5)

2. Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu

Tabel 4
Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi	
		(Jumlah)	(Satuan)				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	KPU							
A.1	Dalam Negeri							
1.								
dst								
	Jumlah A.1							
A.2	Luar Negeri							
1.								
dst								
	Jumlah A.2							
	Jumlah A (A.1 + A.2)							
B.	KPU Provinsi							
1.								
dst								
	Jumlah B							
C.	KPU Kabupaten/ Kota							
1.								
dst								
	Jumlah C							

Tabel 4
Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi	
		(Jumlah)	(Satuan)				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
D.	PPLN							
1.								
dst								
	Jumlah D							
	Jumlah A + B + C + D							

Keterangan:

1. Kolom (8) = Kolom (6) – Kolom (7);
2. Kolom (9) = Kolom (8) : kolom (7) x 100 %; dan
3. Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (5), Kolom (7) dan Kolom (8)

3. Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu

Tabel 5
Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah SPK	Nilai Total SPK (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	KPU				
A.1	Dalam Negeri				
1.					
dst					
	Jumlah A.1				
A.1	Luar Negeri				
1.					
dst					
	Jumlah A.2				
	Jumlah A (A1+A2)				
B.	KPU Provinsi				
1.					

Tabel 5
Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah SPK	Nilai Total SPK (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
dst					
	Jumlah B				
C.	KPU Kabupaten/Kota				
1.					
dst					
	Jumlah C				
D.	PPLN				
1.					
dst					
	Jumlah D				
	Jumlah A + B + C + D				

Keterangan:

Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (5) dan Kolom (6).

4. Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu

Tabel 6
Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu Tahun

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah Penyedia	Beban Kerja Penyedia (%)
		Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	KPU				
1.					
dst					
	Jumlah A				
B.	KPU Provinsi				
1.					
dst					

Tabel 6
Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu Tahun

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah Penyedia	Beban Kerja Penyedia (%)
		Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah B				
C.	KPU Kabupaten/Kota				
1.					
dst					
	Jumlah C				
D.	PPLN				
1.					
dst					
	Jumlah D				
	Jumlah A + B + C				

Keterangan:

1. Kolom (6) = (Kolom (3) : Kolom (5) x 100%; dan
2. Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (5)

5. Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu

Tabel 7
Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Satuan	Jumlah Produksi	Jumlah Pemenuhan Kekurangan	Efektivitas (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
dst					

Keterangan:

Kolom (6) = (Kolom (4) – Kolom (5)) : Kolom (4) x 100%

C. Pendistribusian Logistik Pemilu

Sub Bab ini mendeskripsikan dan membahas pendistribusian Logistik Pemilu yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN, meliputi:

1. zonasi distribusi Logistik Pemilu Luar Negeri sebagaimana tercantum pada Tabel 8;
2. pendistribusian Logistik Pemilu Luar Negeri dari KPU ke PPLN melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Tabel 9;
3. pendistribusian Logistik Pemilu Luar Negeri dari PPLN ke KPPSLN sebagaimana tercantum pada Tabel 10;
4. pendistribusian Logistik Pemilu dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Tabel 11;
5. pendistribusian Logistik Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS sebagaimana tercantum pada Tabel 12;
6. moda transportasi Logistik Pemilu luar negeri sebagaimana tercantum pada Tabel 13; dan

7. moda transportasi Logistik Pemilu dalam negeri sebagaimana tercantum pada Tabel 14.

Adapun format Tabel 8, Tabel 9, Tabel 10, Tabel 11, Tabel 12, Tabel 13 dan Tabel 14 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas pendistribusian Logistik Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Zonasi Distribusi Logistik Pemilu Luar Negeri

Tabel 8
Zonasi Distribusi Logistik Pemilu Luar Negeri Tahun

No	Zona Pengiriman Logistik	Jumlah PPLN berdasarkan Prioritas Pengiriman				
		Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
dst						
	Jumlah					

2. Pendistribusian Logistik Pemilu Luar Negeri dari KPU ke PPLN melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia

Tabel 9
Pendistribusian Logistik Pemilu Luar Negeri Tahun dari KPU ke PPLN melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia

No	Kantor Perwakilan RI	Jumlah Kantong Diplomatik (kantong)	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkut an	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
dst						
	Jumlah					

Keterangan:

1. Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6) dan Kolom (7) bisa diisi lebih dari 1 item; dan
2. Baris penjumlahan diisi pada Kolom (3).

3. Pendistribusian Logistik Pemilu Luar Negeri dari PPLN ke KPPSLN

Tabel 10
Pendistribusian Logistik Pemilu Luar Negeri Tahun dari PPLN ke KPPSLN

No	Tempat Tujuan	Jumlah KPPSLN	Jumlah Pemilih (orang)	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Bukit)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari PPLN	Tanggal Ketibaan di KPPSLN	Moda Angkut an	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	PPLN								
1.	KPPSLN TPSLN								
2.	KPPSLN KSK								
3.	KPPSLN Pos								
B.	PPLN								
1.									
dst									
	Jumlah								

Keterangan:

1. Kolom (7), Kolom (8), Kolom (9) dan Kolom (10) bisa diisi lebih dari 1 item; dan
2. Baris penjumlahan diisi pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5) dan Kolom (6).

4. Pendistribusian Logistik Pemilu dari Penyedia ke KPU
Kabupaten/Kota

Tabel 11

Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota

Jenis Logistik:

No	Provinsi	Jumlah KPU Kab/Kota	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (orang)	Jumlah Kemasan	Satuan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
dst										

Keterangan:

1. Kolom (7), Kolom (8), Kolom (9) dan Kolom (10) bisa diisi lebih dari 1 item; dan
2. Baris penjumlahan diisi pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5) dan Kolom (6).

5. Pendistribusian Logistik Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS

Tabel 12

Pendistribusian Logistik Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota Tahun ke TPS

No	Provinsi	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (orang)	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan	Kendala
----	----------	---------------	------------------------------	--	---	--	----------------------------------	------------------	---------

				(Bua h)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
dst									
	Jumlah								

Keterangan:

1. Kolom (7), Kolom (8), Kolom (9) dan Kolom (10) bisa diisi lebih dari 1 item; dan
2. Baris penjumlahan diisi pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5) dan Kolom (6).

6. Moda Transportasi Logistik Pemilu Luar Negeri

Tabel 13

Moda Transportasi Logistik Pemilu Luar Negeri Tahun ...

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi Logistik Pemilu ke									
		Kantor Perwakilan RI		PPLN		KPPSLN TPSLN		KPPSLN KSK		KPPSLN Pos	
		(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pesawat/Helikopter										
2	Mobil Truck										
3	Mobil Pick up										
4	Sepeda Motor/ Sepeda Kayuh										
5	Speedboat/ Perahu										
6	Kuda/Angkutan Tenaga Hewan										
7	Dipikul/Jalan Kaki										
dst											

Tabel 13

Moda Transportasi Logistik Pemilu Luar Negeri Tahun ...

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi Logistik Pemilu ke									
		Kantor Perwakilan RI		PPLN		KPPSL N TPSLN		KPPSLN KSK		KPPSLN Pos	
		(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Jumlah										

Keterangan:

1. Kolom (4) = Kolom (3) setiap baris : Kolom (3) baris penjumlahan x 100%;
2. Kolom (6) = Kolom (5) setiap baris : Kolom (5) baris penjumlahan x 100%;
3. Kolom (8) = Kolom (7) setiap baris : Kolom (7) baris penjumlahan x 100%;
4. Kolom (10) = Kolom (9) setiap baris : Kolom (9) baris penjumlahan x 100%; dan
5. Kolom (12) = Kolom (11) setiap baris : Kolom (11) baris penjumlahan x 100%.

7. Moda Transportasi Logistik Pemilu Dalam Negeri

Tabel 14

Moda Transportasi Logistik Pemilu Dalam Negeri Tahun

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi Logistik Pemilu ke							
		Kab/Kota		PPK		PPS		TPS	
		(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pesawat/Helikopter								
2	Mobil Truck								
3	Mobil Pick up								

Tabel 14

Moda Transportasi Logistik Pemilu Dalam Negeri Tahun

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi Logistik Pemilu ke							
		Kab/Kota		PPK		PPS		TPS	
		(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Sepeda Motor/ Sepeda Kayuh								
5	Speedboat/ Perahu								
6	Kuda/Angkutan Tenaga Hewan								
7	Dipikul/Jalan Kaki								
dst									
	Jumlah								

Keterangan:

1. Kolom (4) = Kolom (3) setiap baris : Kolom (3) baris penjumlahan x 100%;
2. Kolom (6) = Kolom (5) setiap baris : Kolom (5) baris penjumlahan x 100%;
3. Kolom (8) = Kolom (7) setiap baris : Kolom (7) baris penjumlahan x 100%; dan
4. Kolom (10) = Kolom (9) setiap baris : Kolom (9) baris penjumlahan x 100%.

D. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu

Sub Bab ini mendeskripsikan dan membahas hasil kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN, yang masing-masing dilakukan di gudang KPU, gudang KPU Kabupaten/Kota, dan gudang PPLN, meliputi:

1. hasil penyortiran dan penghitungan Logistik Pemilu Luar Negeri di gudang KPU sebagaimana tercantum pada Tabel 15;

2. hasil penyortiran dan penghitungan Logistik Pemilu Dalam Negeri di gudang KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Tabel 16;
3. penerimaan Logistik Pemilu oleh PPLN dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Tabel 17;
4. hasil penyortiran dan penghitungan Logistik Pemilu Luar Negeri di gudang PPLN sebagaimana tercantum pada Tabel 18; dan
5. kondisi gudang KPU, gudang KPU Kabupaten/Kota, dan gudang PPLN sebagaimana tercantum pada Tabel 19.

Adapun format Tabel 15, Tabel 16, Tabel 17, Tabel 18, dan Tabel 19 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas hasil kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Luar Negeri di Gudang KPU

Tabel 15
Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Luar Negeri Tahun ...
di Gudang KPU

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
dst										
	Jumlah									

Keterangan:

- Kolom (6) diisi jika jumlah Kolom (4)/Dipesan lebih besar dari jumlah Kolom (5)/Diterima, Kolom (6) = kolom (4) – kolom (5);
- Kolom (7) diisi jika jumlah Kolom (5)/Diterima lebih besar dari jumlah Kolom (4)/Dipesan, Kolom (7) = kolom (5) – kolom (4);
- Kolom (9) = Kolom (5) - Kolom (8);
- Kolom (10) diisi, jika jumlah Kolom (8)/Baik lebih kecil daripada jumlah Kolom (4)/Dipesan;
- Kolom (10) = Kolom (4) - Kolom (8); dan
- Kolom (11) = kolom (10) : kolom (4) x 100%.

2. Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Dalam Negeri
di Gudang KPU Kabupaten/Kota

Tabel 16
Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Dalam Negeri Pemilu
Tahun ... di Gudang KPU Kabupaten/Kota

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
dst										
	Jumlah									

Keterangan:

1. Kolom (6) diisi jika jumlah Kolom (4)/Dipesan lebih besar dari jumlah Kolom (5)/Diterima, Kolom (6) = kolom (4) – kolom (5);
2. Kolom (7) diisi jika jumlah Kolom (5)/Diterima lebih besar dari jumlah Kolom (4)/Dipesan, Kolom (7) = kolom (5) – kolom (4);
3. Kolom (9) = Kolom (5) - Kolom (8);
4. Kolom (10) diisi, jika jumlah Kolom (8)/Baik lebih kecil daripada jumlah Kolom (4)/Dipesan;
5. Kolom (10) = Kolom (4) - Kolom (8); dan
6. Kolom (11) = kolom (10) : kolom (4) x 100%.

3. Penerimaan Logistik Pemilu oleh PPLN dari Kantor Perwakilan RI

Tabel 17

Penerimaan Logistik Pemilu oleh PPLN
dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia

No .	Kantor Perwakilan RI	Jumlah Kantong Diplomatik berisi Logistik Pemilu	Penerimaan		Keterangan
			Tempat	Tanggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
dst					
	Jumlah				

Keterangan:

Baris penjumlahan diisi pada Kolom (3)

4. Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu di Gudang PPLN

Tabel 18
Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun
di Gudang PPLN

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
dst										
	Jumlah									

Keterangan:

1. Kolom (6) diisi jika jumlah Kolom (4)/Dipesan lebih besar dari jumlah Kolom (5)/Diterima, Kolom (6) = kolom (4) – kolom (5);
2. Kolom (7) diisi jika jumlah Kolom (5)/Diterima lebih besar dari jumlah Kolom (4)/Dipesan, Kolom (7) = kolom (5) – kolom (4);
3. Kolom (9) = Kolom (5) - Kolom (8);
4. Kolom (10) diisi, jika jumlah Kolom (8)/Baik lebih kecil daripada jumlah Kolom (4)/Dipesan;
5. Kolom (10) = Kolom (4) - Kolom (8); dan
6. Kolom (11) = kolom (10) : kolom (4) x 100%.

5. Kondisi Gudang Logistik Pemilu

Tabel 19

Kondisi Gudang Logistik Pemilu Tahun

No	Kondisi Gudang	Status Kepemilikan						Jangka Waktu (bulan)	
		Milik Sendiri		Pinjam		Sewa		Pinjam	Sewa
		(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Gudang KPU								
1.	Memadai								
2.	Kurang Memadai								
	Jumlah A								
B.	Gudang KPU Kabupaten/Kota								
1.	Memadai								
2.	Kurang Memadai								
	Jumlah B								
C.	Gudang PPLN								
1.	Memadai								
2.	Kurang Memadai								
	Jumlah C								
	Jumlah A + B + C								
1.	Memadai								
2.	Kurang Memadai								

Keterangan:

1. Milik Sendiri adalah Gudang milik KPU untuk huruf A dan B, dan gudang Milik Kantor Perwakilan RI untuk huruf C;

2. Kolom (4) = Kolom (3) pada setiap baris : Kolom (3) pada baris penjumlahan x 100%;
3. Kolom (6) = Kolom (5) pada setiap baris : Kolom (5) pada baris penjumlahan x 100%; dan
4. Kolom (8) = Kolom (7) pada setiap baris : Kolom (7) pada baris penjumlahan x 100%.

E. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara

Sub Bab ini mendeskripsikan dan membahas hasil pelaksanaan pemusnahan kelebihan surat suara Pemilu yang dilaksanakan di Percetakan, KPU, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN, meliputi:

1. pemusnahan kelebihan surat suara di Percetakan sebagaimana tercantum pada Tabel 20;
2. pemusnahan kelebihan surat suara di KPU sebagaimana tercantum pada Tabel 21;
3. pemusnahan kelebihan surat suara di KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Tabel 22; dan
4. pemusnahan kelebihan surat suara di PPLN sebagaimana tercantum pada Tabel 23.

Adapun format Tabel 20, Tabel 21, Tabel 22 dan Tabel 23 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas hasil pelaksanaan pemusnahan kelebihan surat suara Pemilu adalah sebagai berikut:

1. pemusnahan kelebihan surat suara di percetakan

Tabel 20

Pemusnahan Kelebihan Surat Suara di Percetakan

No	Jenis Surat Suara	Jumlah yang Dipesan (lembar)	Jumlah yang Diproduksi (lembar)	Jumlah yang Dikirim (lembar)	Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan	
					(lembar)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
dst						
	Jumlah					

Keterangan:

1. Kolom (6) = Kolom (4) – Kolom (5); dan
2. Kolom (7) = Kolom (6) : Kolom (3) x 100%.

2. pemusnahan kelebihan surat suara di KPU

Tabel 21

Pemusnahan Kelebihan Surat Suara di Gudang KPU

No	Jenis Surat Suara	Jumlah yang Dipesan (lembar)	Jumlah Surat Suara yang Diterima (lembar)		Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan	
			Baik	Rusak	(lembar)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
dst						
	Jumlah					

Keterangan:

1. Kolom (6) = Kolom (4) – Kolom (3) + Kolom (5); dan
2. Kolom (7) = Kolom (6) : Kolom (3) x 100%.

3. pemusnahan kelebihan surat suara di KPU Kabupaten/Kota

Tabel 22

Pemusnahan Kelebihan Surat Suara di KPU Kabupaten/Kota

No	Jenis Surat Suara	Jumlah yang Dipesan (lembar)	Jumlah Surat Suara yang Diterima (lembar)		Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan	
			Baik	Rusak	(lembar)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
dst						
	Jumlah					

Keterangan:

1. Kolom (6) = Kolom (4) – Kolom (3) + Kolom (5); dan
2. Kolom (7) = Kolom (6) : Kolom (3) x 100%.

4. pemusnahan kelebihan surat suara di PPLN

Tabel 23

Pemusnahan Kelebihan Surat Suara di Gudang PPLN

No	Jenis Surat Suara	Jumlah yang Dipesan (lembar)	Jumlah Surat Suara yang Diterima (lembar)		Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan	
			Baik	Rusak	(lembar)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
dst						
	Jumlah					

Keterangan:

1. Kolom (6) = Kolom (4) – Kolom (3) + Kolom (5); dan
2. Kolom (7) = Kolom (6) : Kolom (3) x 100%.

BAB III EVALUASI

Bab ini memuat analisa mendalam antara regulasi dan kebijakan KPU dengan kegiatan yang dilaksanakan, permasalahan yang dihadapi dan langkah pemecahannya, serta hasil pelaksanaan kegiatan. Disamping itu, Bab ini juga menjelaskan tentang inovasi/kegiatan yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tahapan Tata Kelola Logistik Pemilu.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi sejumlah kesimpulan hasil pelaksanaan kegiatan tahapan Tata Kelola Logistik Pemilu. Selain kesimpulan, dapat disampaikan rekomendasi untuk menyempurnakan kegiatan tahapan Tata Kelola Logistik Pemilu berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran memuat dokumen tambahan dapat berupa tabel, gambar atau teks sebagai data dukung, yang disusun sesuai dengan nomor urut sesuai dengan urutan penyebutannya dalam tubuh laporan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Evaluasi logistik Pemilu, sebagaimana diuraikan pada Bab 2, merupakan satu kesatuan siklus yang tidak dapat dipisah-pisahkan, dimulai dari perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, produksi, pengiriman dari Penyedia ke tempat penyimpanan/gudang, pengelolaan di gudang, pemusnahan kelebihan surat suara, pendistribusian ke TPS/TPSLN, hingga distribusi balik logistik pasca pemungutan suara ke tempat penyimpanan/gudang. Setiap tahapan saling bergantung satu sama lain: kelemahan evaluasi pada satu tahap, misalnya pada tahap perencanaan kebutuhan, akan terbawa dan membesar dampaknya pada tahap-tahap berikutnya, seperti produksi, pengiriman, hingga akhirnya berpotensi menimbulkan kekurangan logistik di TPS pada hari pemungutan suara.

Prinsip dasar yang menjadi acuan seluruh tahapan evaluasi dalam buku panduan ini adalah terpenuhinya logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran/lokasi. Sistem Informasi Logistik (SILOG) berperan sebagai tulang punggung digitalisasi monitoring, mulai dari perhitungan otomatis kebutuhan, tracking pengiriman secara real-time, hingga penyediaan dashboard nasional yang memantau siklus inti monitoring logistik secara berkelanjutan dan menjadi sumber data bagi rekapitulasi dan pelaporan.

Hasil evaluasi tata kelola logistik pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 menunjukkan bahwa sistem monitoring logistik yang ada telah berjalan relatif baik, ditandai antara lain dengan tingkat pemenuhan kebutuhan logistik yang tinggi di sebagian besar wilayah dan pemanfaatan SILOG yang semakin meluas. Meskipun demikian, evaluasi tersebut juga mengidentifikasi sejumlah celah yang perlu terus diperbaiki, di antaranya dominasi status gudang sewa dan pinjam yang membuat kesiapan operasional sangat bergantung pada pihak ketiga, keterlambatan dan ketidaksesuaian jadwal pengiriman, ketidaksinkronan

antar-dokumen berita acara pada tahap sortir hingga pemusnahan, keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pada tahap pengesetan logistik, kepatuhan pelaporan yang belum merata dari PPLN, serta tantangan distribusi logistik pada daerah yang terdampak bencana alam (*force majeure*).

Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa monitoring logistik Pemilu tidak boleh berhenti pada pemenuhan prosedur administratif semata, tetapi harus dimaknai sebagai upaya menjaga rantai pengamanan (*chain of custody*) logistik secara utuh, mulai dari perencanaan hingga logistik kembali tersimpan aman di gudang pasca pemungutan suara. Konsistensi pelaksanaan monitoring pada setiap tahapan, disertai dokumentasi yang akurat dan saling terverifikasi, menjadi kunci utama terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil, dan akuntabel dari sisi tata kelola logistik.

4.2 Usulan

Berdasarkan uraian tahapan evaluasi pada Bab 2 serta hasil evaluasi tata kelola logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, disusun sejumlah usulan sebagai bahan penyempurnaan pedoman dan pelaksanaan evaluasi logistik Pemilu pada periode berikutnya:

1. Penguatan basis data dan status kepemilikan gudang.

Mendorong penambahan gudang milik sendiri secara bertahap di tingkat KPU Kabupaten/Kota dan PPLN, mengingat sebagian besar gudang saat ini berstatus sewa atau pinjam sehingga kesiapan operasionalnya sangat bergantung pada pihak ketiga.

2. Digitalisasi dan integrasi seluruh berita acara ke dalam SILOG.

Menyatukan Berita Acara hasil sortir dan lipat, Berita Acara Pemusnahan, dan Berita Acara serah terima logistik dalam satu alur data digital yang saling terverifikasi otomatis, guna mencegah ketidaksinkronan data antar-dokumen sebagaimana ditemukan pada evaluasi Tahun 2024.

3. Penguatan kapasitas sumber daya manusia logistik di tingkat satuan kerja.

Menyelenggarakan pelatihan berkala bagi Tim Pelaksana Kegiatan, khususnya menjelang periode sortir, pengesetan, dan pengepakan logistik yang padat waktu dan rawan kesalahan apabila SDM terbatas.

4. Penyusunan peta risiko bencana dan rencana kontingensi logistik secara nasional sejak tahap perencanaan.

Memetakan wilayah rawan bencana, cuaca ekstrem, dan gangguan keamanan sejak awal siklus logistik, sehingga penanganan *force majeure* bersifat antisipatif dan bukan semata-mata reaktif setelah kejadian berlangsung.

5. Peningkatan kepatuhan pelaporan PPLN.

Memperkuat mekanisme pengingat dan pendampingan bagi PPLN dalam menyampaikan Berita Acara Pemusnahan serta laporan pelaksanaan metode Pos dan Kotak Suara Keliling (KSK), mengingat pengawasan langsung di negara akreditasi memiliki keterbatasan.

6. Kajian metode pemusnahan surat suara yang lebih memperhatikan aspek lingkungan.

Mengevaluasi metode pemusnahan yang selama ini digunakan agar tidak menimbulkan dampak polusi, dengan mempertimbangkan alternatif metode yang lebih ramah lingkungan tanpa mengurangi aspek keamanan dan kerahasiaan.

7. Penguatan kewajiban integrasi live tracking Penyedia dengan SILOG.

Menjadikan integrasi sistem tracking pengiriman sebagai syarat wajib yang termuat eksplisit dalam kontrak dengan Penyedia/ekspedisi, disertai sanksi bagi Penyedia yang tidak memperbarui data pergerakan logistik secara berkala.

8. Penyediaan stok logistik cadangan nasional untuk mitigasi *force majeure*.

Menetapkan besaran stok cadangan logistik strategis (surat suara, formulir, dan kelengkapan TPS) yang dapat dimobilisasi cepat ke daerah terdampak bencana tanpa harus menunggu proses pengadaan ulang.

9. Sinkronisasi data antar sistem informasi KPU.

Memastikan keterhubungan data antara Sidalih, SILOG, dan sistem

informasi lain agar perhitungan kebutuhan logistik senantiasa mengikuti dinamika perubahan Daftar Pemilih Tetap secara akurat dan real-time.

10. Penguatan koordinasi lintas sektor sebagai bagian permanen dari SOP.

Menjadikan koordinasi dengan BPBD, TNI/Polri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Luar Negeri sebagai mekanisme kerja sama yang melembaga dan berkelanjutan, bukan hanya diaktifkan pada saat kondisi darurat terjadi